

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “**Anwar Ramli (2011)**” dengan judul penelitian “**Analisis Pengembalian Dana Bergulir Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Makassar (Studi Khusus BKM Maccini Salewangang Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar)**”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor LAR, PAR, CCR dan ROI berpengaruh terhadap dana pinjaman bergulir (RR) di BKM Maccini Selawengan PNPK Kota Makassar ?
2. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman bergulir ?

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Variabel LAR dan PAR berpengaruh negatif terhadap kelancaran pengembalian pinjaman bergulir, dimana LAR dan PAR yang tinggi menyebabkan kelancaran dana pinjaman bergulir menjadi rendah.
- b. Variabel CCR dan ROI berpengaruh positif yang signifikan terhadap kelancaran pinjaman bergulir, dimana CCR dan ROI yang tinggi menyebabkan kelancaran dana pinjaman bergulir menjadi tinggi.

Variabel yang paling didominasi mempengaruhi pengembalian pinjaman bergulir adalah ROI yang tinggi menyebabkan kelancaran dana pinjaman bergulir menjadi tinggi.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu yang dilakukan oleh **“Prita Permata Putri Pertiwi (2012)”** dengan judul penelitiannya **“Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IRR terhadap Efisiensi biaya pada bank pembangunan daerah di Jawa dengan menggunakan Stochastic Frontier”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IRR berpengaruh terhadap efisiensi biaya pada bank pembangunan daerah di Jawa ?
2. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi efisiensi biaya pada bank pembangunan daerah di Jawa?

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Dari pengujian F statistik dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ diperoleh F-tabel sebesar 2,2904 sementara diperoleh F-statistik sebesar 8,184
- b. Variabel LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IRR dalam penelitian ini secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi biaya sebesar 0,501 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan secara parsial variabel LDR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi biaya sebesar 37,57 persen. Variabel IPR, APB, NPL, PPAP dan IRR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap efisiensi biaya dan

memiliki pengaruh terhadap efisiensi sebesar 1,82 persen, 1,27 persen, 0,38 persen, 2,37 persen dan 16,97 persen.

- c. Variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap efisiensi biaya pada bank pembangunan daerah jawa adalah Loan to Deposite Ratio sebesar 37,57 persen.

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU
DENGAN PENELITIAN SEKARANG

Kategori	Anwar Ramli (2011)	Prita Permata (2012)	Peneliti (2013)
Periode Data	2011	2012	2012 – 2013
Populasi	PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Makasar	Bank Pembangunan Daerah di Jawa	PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo
Variabel Tergantung	Pengembalian Pinjaman (RR)	Efisiensi Biaya	Efisiensi (CCr)
Variabel Bebas	LAR, PAR, CCR, dan ROI	LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IRR	RR, LAR, PAR, Jumlah KSM, dan Fasilitator Lapangan
Teknik Sampling	Sensus	Sensus	Sensus
Jenis data	Primer	Sekunder	Sekunder Kuantitatif
Teknik Analisis Data	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi

Sumber : Anwar Ramli th. 2011, Prita Permata th. 2012

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis serta sebagai dasar untuk melakukan pembahasan guna pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan. Landasan teori ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang penelitian secara teoritis.

2.2.1 Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu di raih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan dana bergulir PNPM Mandiri diperlukan adanya suatu standarisasi yang bisa dipakai yaitu rasio yang merupakan suatu cara yang paling umum digunakan dalam menganalisa laporan keuangan. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Dalam PNPM Mandiri terdapat pengelolaan dana bergulir yang dapat dinilai dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya adalah rasio likuiditas,

kualitas aktiva, efisiensi, dan beberapa faktor internal lainnya seperti jumlah KSM dan fasilitator lapangan.

2.2.1.1 Rasio Likuiditas

Menurut kasmir (2010:286) likuiditas adalah faktor penting untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban pada saat ditagih, hal ini juga berlaku pada lembaga keuangan mikro (UPK). Menurut Kasmir (2010 : 286-290) Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah sebagai berikut :

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan . LDR yang tinggi merupakan satu tanda peringatan kepada mereka, agar lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pemberian kredit.

Rumus yang digunakan :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2. *Cash Ratio (CR)*

CR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus yang dapat digunakan adalah:

$$\text{CR} = \frac{\text{Alat - alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

3. *Loan To Asset Ratio (LAR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi tingkat rasio semakin

rendahnya tingkat likuiditas bank. Rasio ini memberikan informasi porsi dana yang dialokasikan dalam bentuk kredit dari total asset bank. Kenaikan rasio ini akan menunjukkan rendahnya likuiditas bank. Rumus yang dapat digunakan adalah :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

4. *Investing Policy Ratio (IPR)*

IPR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimiliki. IPR ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh bank untuk meningkatkan pendapatan melalui surat-surat berharga yang dimiliki yang terdiri dari sertifikat BI dan surat-surat berharga lainnya Rumus

IPR yang dapat digunakan adalah :

$$\text{IPR} = \frac{\text{Surat Berharga Yang Dimiliki Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

5. *Quick Ratio*

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposit) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari *Quick Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total deposit}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

6. *Banking Ratio*

Banking ratio bertujuan mengukur tingkat likuiditas dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *Banking Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total deposits}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Pendapat Kasmir yang mengulas tentang rasio likuiditas juga didukung oleh Lincoln Arsyad (2008:154) yang juga mengulas tentang rasio likuiditas yakni sebagai berikut:

1. *Repayment Rate* (RR)

Repayment Rate (RR) adalah tingkat pengembalian pinjaman dimana indikator kinerja ini merupakan yang paling penting bagi LKM karena indikator tersebut merupakan prasyarat utama agar sebuah LKM mampu mandiri dan sustanabel dalam jangka panjang. Lincoln Arsyad (2008:154)

Tingkat pengembalian pinjaman ini dapat dihitung dengan menggunakan rasio:

$$RR = \frac{\text{Pinjaman Berjalan}}{\text{Total Pinjaman Berjalan}} \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur Likuiditas adalah *Repayment Rate* (RR).

2.2.1.2 Rasio Kualitas Aktiva

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 473), Rasio kualitas aktiva ini merupakan aset untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai riil dari aset tersebut. menurunnya kualitas dan nilai aset - aset merupakan sumber erosi terbesar bagi bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen resiko kredit.

Menurut Viethzhal Rivai (2013 : 473 – 474) rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas aktiva suatu bank adalah sebagai berikut :

1. *Bad Debt Ratio (BDR)*

Aktiva produktif yang diklasifikasikan ialah semua aktiva yang dimiliki oleh bank yang karena suatu sebab terjadi gangguan usaha debitur mengalami kesulitan dalam cash flow yang dapat mengakibatkan kesulitan membayar bunga dan bahkan angguran utang pokoknya. Rumus yang dapat digunakan adalah :

$$\text{BDR} = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

2. *Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)*

Kualitas aktiva produktif adalah perbandingan antara classified asset (kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet) dengan total Earning assets (kredit yang diberikan, surat berharga, aktiva antar bank dan penyertaan). Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP Dibentuk}}{\text{PPAP Wajib}} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

Pendapat Veitzhal Rivai yang mengulas tentang Rasio kualitas aktiva didukung oleh Modul Khusus Pinjaman Bergulir yang menjelaskan tentang kualitas aktiva dengan menggunakan rasio *Loan At Risk (LAR)* dan *Portfolio At Risk (PAR)* yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. *Loan At Risk (LAR)*

Dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:37) *Loan At Risk (LAR)* merupakan indikator yang menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak, Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM peminjam yang menunggak lebih dari tiga bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman. *Loan At Risk (LAR)* dapat dirumuskan dengan :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah KSM menunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{Jumlah KSM peminjam}} \times 100\% \dots \dots \dots (10)$$

2. *Portofolio At Risk (PAR)*

Dalam modul khusus pinjaman bergulir (2012:37) mendefinisikan *Portofolio At Risk (PAR)* adalah indikator yang menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak lebih dari tiga bulan dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK. *Portofolio At Risk (PAR)* menunjukkan jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beresiko hilang atau menunggak lebih dari tiga bulan. Dikatakan BKM dalam kondisi sehat apabila PAR kurang dari 10%, ini berarti bila dana bergulir dikucurkan kepada 24 KSM maka KSM yang bermasalah harus kurang dari 2 KSM. Dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:37) *Portofolio At Risk (PAR)* dapat dirumuskan dengan:

$$\text{PAR} = \frac{\text{pinjaman tertunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{realisasi saldo pinjaman}} \times 100\% \dots \dots \dots (11)$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aktiva adalah *Loan At Risk (LAR)* dan *Portofolio At Risk (PAR)*.

2.2.1.3 Jumlah KSM

Secara umum, KSM dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang menyatukan diri dalam kelompok yang bergerak dibidang sosial-ekonomi yang tumbuh kembang dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.(P2KP, 2013)

Dalam modul PNPM Mandiri khususnya pinjaman bergulir menjelaskan bahwa jumlah anggota KSM atau disebut juga dengan jumlah

masyarakat miskin merupakan jumlah anggota KSM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir. Ketentuan dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir, indikator jumlah KSM ini adalah 100% untuk kategori memuaskan dan 70% untuk kategori minimum.

2.2.1.4 Fasilitator Lapangan

Dalam modul PNPM Mandiri Fasilitator Lapangan adalah yang membantu berjalannya program PNPM Mandiri. Untuk membantu atau mendampingi masyarakat dan memfasilitasi, maka diperlukan efektifitas penguasaan yang terus menerus. Fasilitator perlu mempertemukan hubungan yang produktif antar mereka.

2.2.2 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan resiko yang disebabkan cukup dan atau tidaknya proses internal, kesalahan internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Rasio efisiensi dalam UPK PNPM Mandiri pengukurannya dapat dilakukan melalui rasio *Cost Coverage ratio* (CCr). Berikut adalah penjelasan mengenai CCr :

1. *Cost Coverage ratio* (CCr)

Menurut modul khusus pinjaman bergulir (2012:37) menjelaskan bahwa *Cost Coverage ratio* (CCr) adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. *Cost Coverage Ratio* (CCr) mengukur berapa besar rasio pendapatan dibandingkan biaya. Berapa pendapatan yang meng-cover biaya.

Dikatakan berkinerja baik apabila lebih besar dari 125%, artinya bila UPK BKM berani untuk mengeluarkan biaya Rp 100, maka UPK BKM harus dapat memperoleh pendapatan minimal Rp 125. Rumus dari *Cost Coverage ratio* (CCr) dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:38) adalah sebagai berikut:

$$CCr = \frac{\text{total pendapatan UPK}}{\text{biaya UPK}} \times 100\% \dots\dots\dots(12)$$

2.2.3 Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah upaya penyediaan jasa keuangan terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lainnya yang diperuntukkan untuk keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. (Lincoln Arsyad:23)

Dalam lembaga keuangan mikro (LKM) sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya. Seperti bank dan lembaga non bank lainnya. LKM ini harus dijaga kinerja keuangannya agar bisa menjadi lembaga yang mampu bertahan lebih lama lagi. Terdapat empat karakteristik yang menjelaskan mengapa LKM memerlukan biaya transaksi yang lebih rendah daripada bank – bank modern yaitu:

1. LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya dibanding bank – bank komersial. Pemberi pinjaman memiliki informasi yang mencukupi tentang peminjam yang diperoleh dari hubungannya dengan lingkungan sekitar dan komunitas atau dari transaksi – transaksi kredit sebelumnya. Hal tersebut dapat mengurangi biaya informasi mereka dibanding biaya yang harus dikeluarkan bank komersial.

2. Biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh LKM lebih rendah daripada bank – bank komersial karena pegawai LKM dibayar relatif lebih rendah (karena kurang terdidik), skala usaha yang tidak besar, Menurut Lincoln Arsyad pekerjaan administrasi yang lebih sederhana dibanding bank komersial.
3. Tingkat bunga LKM tidak diatur secara khusus yang karenanya dapat disesuaikan dengan kehendak pasar. Akibatnya, kompetisi non-harga dapat ditekan hingga tingkat yang optimal.
4. LKM tidak memiliki kewajiban pencadangan modal (reserve requirements) seperti yang diterapkan pada bank komersial modern. (Lincoln Arsyad:26)

Pengukuran kinerja LKM harus didasarkan pada tujuan LKM meskipun tujuan utama kebanyakan LKM adalah meningkatkan kesejahteraan orang – orang miskin. Ada dua kriteria penilaian untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu yang pertama adalah kemandirian yang dapat dicapai apabila tingkat kembalian ekuitas, jumlah bersih subsidi yang diterima, sama dengan atau melebihi biaya oportunitas dan ekuitas. Yang kedua adalah jumlah klien yang dilayani dan ragam jasa keuangan yang diberikan. (Lincoln Arsyad:56)

2.2.4 Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri yaitu :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. (PNPM MANDIRI, 2013)

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa Program PNPM Mandiri adalah program nasional berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat.

2.2.5 Prinsip PNPM Mandiri

Prinsip PNPM Mandiri terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:

- a) *Bertumpu pada Pembangunan Manusia*. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

- b) *Otonomi*. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- c) *Desentralisasi*. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- d) *Berorientasi pada Masyarakat Miskin*. Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- e) *Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat*. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
- f) *Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- g) *Demokratis*. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h) *Transparansi dan Akuntabel*. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- i) *Prioritas*. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat

bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

- j) *Kolaborasi*. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- k) *Keberlanjutan*. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.6 PNPM Mandiri Perkotaan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar - dasarsolusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

Sumber dana untuk kegiatan pinjaman bergulir, dapat berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan sumber dana utama. Kemudian bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana yang berasal dari pihak Swasta, dana dari swadaya masyarakat, pemupukan modal berasal dari Laba/Keuntungan hasil pengelolaan Pinjaman bergulir yang disisihkan sesuai AD/ART dan keputusan RWT, dan dana dari sumber lainnya berupa *channeling*/kemitraan atau pinjaman dari Lembaga Keuangan formal baik bank maupun koperasi di sekitar lokasi LKM berada. Tujuan dana *channeling* atau pinjaman tersebut adalah untuk menyediakan akses pinjaman bagi KSM yang sudah memenuhi batas maksimal pemberian pinjaman baik dari sisi jumlah pinjaman (telah mencapai Rp3.000.000,-) atau dari sisi frekuensi peminjaman (sudah mencapai 4 kali pinjam). Diharapkan dengan dana *channeling*/kemitraan maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya KSM dan anggotanya dapat memperoleh akses pinjaman lebih lanjut dari lembaga tersebut.

2.2.7 Pengaruh Antar Variabel

a. Pengaruh Rasio Likuiditas (RR) Terhadap CCr

Apabila RR mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan pengembalian pinjaman lebih besar dibandingkan total pinjaman yang diberikan, sehingga

pendapatan meningkat dan menyebabkan CCr meningkat. Maka pengaruh antara RR dan CCr adalah positif.

b. Pengaruh Kualitas Aktiva (LAR) Terhadap CCr

Apabila LAR mengalami peningkatan maka peningkatan pinjaman tertunggak lebih dari tiga bulan lebih besar daripada peningkatan realisasi saldo pinjaman yang menyebabkan pendapatan menurun sehingga CCr menurun. Maka pengaruh LAR terhadap CCr adalah negatif.

c. Pengaruh Kualitas Aktiva (PAR) Terhadap CCr

Apabila PAR mengalami peningkatan maka peningkatan jumlah KSM yang menunggak lebih dari tiga bulan lebih besar daripada peningkatan jumlah KSM peminjam yang menyebabkan pendapatan menurun sehingga CCr cenderung menurun. Maka pengaruh antara PAR dengan CCr adalah negatif.

d. Pengaruh Jumlah KSM Terhadap CCr

Jumlah KSM memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap CCr. Dikatakan pengaruh positif apabila jumlah KSM meningkat dan peningkatannya diiringi dengan jumlah KSM produktif atau kredit yang diberikan lancar. Berarti peningkatan jumlah KSM akan memberikan penambahan pendapatan berupa pendapatan bunga pinjaman dan akan meningkatkan pendapatan, sehingga CCr juga akan meningkat. Dengan demikian pengaruh antara jumlah KSM dengan CCr adalah positif. Dikatakan memiliki pengaruh negatif apabila peningkatan jumlah KSM meningkat dan peningkatannya tidak diiringi dengan jumlah KSM yang produktif atau kredit yang diberikan adalah kredit macet atau tidak terbayar. Hal ini berarti peningkatan Jumlah KSM akan menimbulkan biaya untuk mengcover kredit yang tidak terbayar sehingga

akan mengurangi pendapatan, dengan demikian posisi CCr akan mengalami penurunan. Maka pengaruh jumlah KSM dengan CCr adalah negatif.

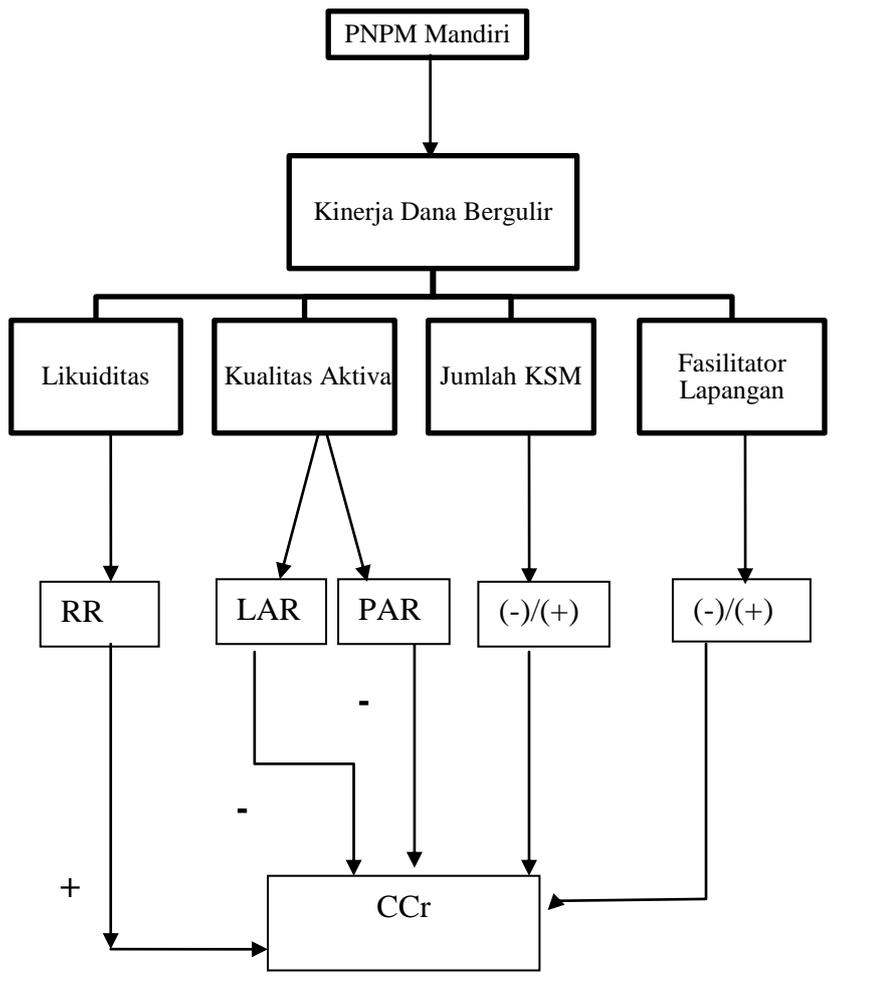
e. Pengaruh Fasilitator Lapangan Terhadap CCr

Fasilitator lapangan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap CCr. Apabila jumlah fasilitator lapangan meningkat dan peningkatannya diiringi dengan kualitas kinerja fasilitator yang baik berarti fasilitator mampu untuk mendorong jumlah KSM yang membayar pinjaman sehingga pendapatan akan meningkat dan CCr juga ikut meningkat. Maka pengaruh antara fasilitator lapangan dengan CCr adalah positif. Dikatakan negatif apabila jumlah fasilitator lapangan meningkat dan peningkatannya diiringi dengan kualitas kinerja fasilitator yang buruk berarti fasilitator kurang mampu untuk mendorong jumlah KSM yang membayar pinjaman sehingga pendapatan menurun dan CCr juga ikut menurun. Maka pengaruh antara fasilitator lapangan dengan CCr adalah negatif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari landasan teori yang ada dalam penelitian ini dapat pula digambarkan melalui kerangka pemikiran pada gambar 2.1. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan pada masing – masing variabel bebas yakni likuiditas (RR), kualitas aktiva (LAR, PAR), Jumlah KSM, dan Fasilitator Lapangan yang mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung yakni CCr dimana pengaruhnya adalah sebagai berikut : pengaruh RR dengan CCr adalah positif, pengaruh LAR dengan CCr adalah negatif, pengaruh PAR dengan CCr

adalah negatif, pengaruh Jumlah KSM dengan CCr adalah positif dan negatif, dan pengaruh Fasilitator Lapangan dengan CCr adalah positif dan negatif.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan konsep – konsep teori yang diajukan, maka hipotesis yang disajikan sebagai berikut :

1. RR, LAR, PAR, Jumlah KSM, dan Fasilitator Lapangan secara bersama – sama berpengaruh terhadap CCr pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo.
2. RR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CCr pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo.
3. LAR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CCr pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo.
4. PAR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CCr pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Jumlah KSM secara parsial berpengaruh terhadap CCr pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo
6. Fasilitator Lapangan secara parsial berpengaruh terhadap CCr pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo.